

KEKUASAAN DAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI PROSES SOSIAL DALAM BERMASYARAKAT

Jeanne Darc N. Manik SH., M.Hum;

Abstract

In the system of society are deliberately structured to achieve specific purposes usually associated with the distribution of power and official authority in formal organizations. However, if a society is to be organized and the integrity of public life is maintained, then the power and authority must be shared on a regular basis, so that everyone will be clear where the power and authority within the organization both horizontally and vertically. Power is an important element in people's lives because of their role to determine the fate of millions of people. Power is always there in the community, both still simple and complex large societies. The existence of power depending on the nature of the relationship between the ruling (leaders) and forced. There is a leader in one particular area, there is also a leader in many aspects of life. There are leaders and there are followers who seek the actually sought his followers. There are official leaders (formal leaders) and there are informal leaders.

Kata Kunci :

Power, Leadership, and Social Procces

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Soerjono Soekanto (1982), di dalam masyarakat manapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu untuk dihargai. Sesuatu yang dihargai di masyarakat bisa berupa kekuasaan, harta kekayaan, ilmu pengetahuan, status haji, status darah biru atau keturunan dari keluarga tertentu yang terhormat atau apapun yang bernilai ekonomis. Di berbagai masyarakat, sesuatu yang dihargai tidaklah selalu sama. Di lingkungan masyarakat pedesaan, tanah sewa dan ternak seringkali dianggap jauh lebih berharga

daripada gelar akademis, misalnya. Sementara itu, dilingkungan masyarakat kota yang modern, yang terjadi seringkali sebaliknya.

Sebagian pakar meyakini bahwa pelapisan dalam masyarakat sesungguhnya sudah mulai ada sejak masyarakat mengenal kehidupan bersama. Dalam masyarakat yang sederhana, lapisan-lapisan dalam masyarakat, lapisan-lapisan dalam masyarakat pada awalnya didasarkan pada perbedaan seks, perbedaan antara pemimpin dengan yang dipimpin, perbedaan umur, bahkan perbedaan yang berdasar pada kekayaan. Pada masyarakat yang demikian, perbedaan kedudukan dan peran masih bersifat

* Penulis adalah Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

sementara, mengingat warganya masih sedikit dan mereka yang mempunyai kedudukan tinggi pun tidak banyak jumlahnya. Sebaliknya, semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks pula lapisan-lapisan dalam masyarakat.

Pitirim A. Sorokin mengemukakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis).² Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggungjawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota-anggota masyarakat.

Bentuk konkret lapisan-lapisan dalam masyarakat tersebut bermacam-macam, namun pada prinsipnya bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas, yaitu :

1. Kelas yang didasarkan pada faktor ekonomis
2. Kelas yang didasarkan pada faktor politis
3. Kelas yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat.

Terjadinya stratifikasi sosial atau sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pelapisan yang terjadinya dengan sendirinya artinya tanpa

disengaja dan sistem pelapisan yang terjadinya dengan sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Lapisan-lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya atau tidak disengaja misalnya lapisan yang didasarkan pada umur, jenis kelamin, kepandaian, sifat keaslian keanggotaan kerabat kepala masyarakat, mungkin dalam batas-batas tertentu berdasarkan harta.

Dalam sistem lapisan masyarakat yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata dan sebagainya. Kekuasaan dan wewenang itu merupakan suatu unsur khusus dalam sistem pelapisan masyarakat yang mempunyai sifat khusus lain daripada tanah, uang dan benda ekonomis lainnya, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Hal ini disebabkan uang, tanah dan sejenisnya dapat dibagi secara bebas dalam masyarakat tanpa merusak keutuhan masyarakat.

Namun demikian, apabila suatu masyarakat hendak hidup teratur dan keutuhan masyarakat tetap terjaga, maka kekuasaan dan wewenang harus dibagi-bagi secara teratur, sehingga setiap orang akan jelas dimana kekuasaan dan wewenangnya dalam organisasi baik secara horizontal maupun vertikal.

Kekuasaan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena peranannya dapat menentukan nasib berjuta-juta orang. Kekuasaan

² Pitirim A. Sorokin dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 152

senantiasa ada dalam masyarakat, baik masih sederhana maupun masyarakat besar yang kompleks. Adapun keberadaan kekuasaan tergantung pada sifat hubungan antara yang berkuasa (pemimpin) dan yang terpaksa. Ada pemimpin disatu bidang tertentu, ada pula pemimpin dalam banyak segi kehidupan. Ada pemimpin yang mencari pengikutnya dan ada yang justru dicari pengikutnya. Ada pemimpin resmi (*formal leader*) dan ada yang *informal leader*.³

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuasaan dapat diperoleh dalam masyarakat sekarang ini?
2. Bagaimanakah kepemimpinan yang terjadi pada saat ini?

1.3 Metode Penulisan

Metode yang dipakai penulisan ini adalah pendekatan deskriptif, yang lebih kepada pemaparan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu, pada suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu. Pendekatan dalam tulisan ini merupakan pendekatan konseptual, yang timbul dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu sosial. Sumber data dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan

kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori atau tulisan-tulisan yang terapat dalam buku-buku literature dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga memberi keputusan-keputusan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.⁴

Kekuasaan dapat bersumber pada bermacam-macam faktor, sehingga apabila dikaitkan dengan kegunaannya, maka akan diperoleh gambarab sebagai berikut :

³ Selo Soemardjan, *Pola-Pola kepemimpinan Dalam Pemerintahan*, ceramah pada Coaching Management Lembaga Pertahanan Nasional, 7 Maret 1967, tidak diterbitkan, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.288-289

⁴ Max Weber, *Essay in Sociology*, Oxford Univercity Press, 1946, hal.180, yang diterjemahkan oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea, *Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Sumber Kekuasaan			
1	Sumber		2. Kegunaan
	a.	Militer, Polisi, Kriminal	a. Pengendalian, kekerasan
	b.	Ekonomi	b. Mengendalikan tanah, buruh, kekayaan material, produksi
	c.	Politik	c. Pengambilan keputusan
	d.	Hukum	d. Mempertahankan, mengubah, melancarkan interaksi
	e.	Tradisi	e. System kepercayaan, nilai-nilai
	f.	Ideology	f. Pandangan hidup, integrasi
	g.	Diversi onary power	g. Kepentingan rekreatif

Sumber : Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 232.

Sarana pelaksanaan kekuasaan dapat berupa :

1. Saluran militer

Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat sehingga mereka tunduk pada kemauan penguasa. Untuk itu dalam organisasi militernya sering dibentuk pasukan khusus, dinas rahasia dan satuan pengamanan kerusuhan. Apabila pengaruh militer ditujukan ke Negara lain, tujuannya adalah menciptakan rasa aman (*security*) agar penguasa dicintai warganya.

2. Saluran ekonomi

Pengusaha berusaha menguasai segala jaringan ekonomi , sehingga penguasa dapat menyalurkan perintah-perintahnya, melalui

berbagai peraturan perekonomian, baik masalah modal, buruh, ekspor-impor dan sebagainya.

3. Saluran politik

Penguasa sengaja membuat berbagai peraturan yang harus ditaati masyarakat agar berbagai perintahnya berjalan lancar. Untuk itu sengaja diangkat pejabat yang loyal.

4. Saluran tradisi

Penguasa mempelajari dan memanfaatkan tradisi yang berlaku dalam masyarakat , guna kelancaran pemerintahan.

5. Saluran ideologi.

Penguasa mengemukakan serangkaian ajaran dan doktrin sehingga menjadi ideologi bangsa sekaligus menjadi dasar pembenaran segala sikap dan tindakannya sebagai penguasa.

6. Saluran lainnya berupa pers, kebudayaan, keagamaan dan sebagainya.

Kekuasaan dapat dilihat pada interaksi sosial antar manusia maupun antar kelompok yang mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu :

1. Rasa takut

Perasaan takut pada seseorang akan menimbulkan kepatuhan terhadap segala kemajuan dan tindakan orang yang ditakuti tersebut. Rasa takut merupakan gejala universal yang terdapat di segala tempat dan biasanya dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat yang mempunyai pemerintahan otoriter.

2. Rasa
Rasa cinta menghasilkan perbuatan yang pada umumnya bersifat posesif, apabila ada suatu reaksi positif dari masyarakat yang dikuasai maka sistem kekuasaan akan dapat berjalan dengan baik dan teratur.
3. Kepercayaan
Kepercayaan bisa timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Soal kepercayaan sangat penting demi kelanggengan kekuasaan.
4. Pemujaan
Sistem kepercayaan mungkin dapat disangkal oleh orang lain, tetapi sistem pemujaan membawa seseorang dan kelompok untuk membenarkan segala sesuatu yang dating dari penguasa tersebut.

Kekuasaan yang telah dilaksanakan, memerlukan serangkaian cara atau usaha-usaha untuk mempertahankannya. Setiap penguasa (pemimpin) yang telah memegang kekuasaan didalam masyarakat, demi stabilnya masyarakat, akan erusaha untuk mempertahankannya. Cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilakukannya adalah antara lain :

1. Dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama peraturan dalam bidang politik, yang merugikan kedudukan penguasa. Peraturan-peraturan tersebut akan digantikan oleh peraturan-peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa. Keadaan tersebut biasanya terjadi

- pada waktu ada pergantian kekuasaan dari seseorang penguasa kepada penguasa lain (yang baru)
2. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan (*belief-systems*) yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya. Sistem kepercayaan meliputi agama, ideologi dan seterusnya.
3. Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik
4. Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal.

Cara mengetahui siapa atau siapa saja yang berkuasa dalam suatu system politik atau dalam suatu masyarakat, dapat dikemukakan tiga analisis sebagai berikut⁵ :

Pertama, dengan analisis posisi, ialah suatu analisis untuk mengetahui siapa yang berkuasa atau mempunyai pengaruh yang besar dalam pembuatan keputusan politik dengan melihat posisinya dalam lembaga pemerintahan. Hak ini, sebenarnya didasarkan pada suatu asumsi bahwa pejabat-pejabat yang menduduki posisi-posisi yang tinggi dalam lembaga pemerintahan cenderung secara politis mempunyai kekuasaan yang besar pula. Untuk mengetahui siapa yang menduduki posisi yang tinggi itu tidaklah sukar, karena pada umumnya telah diarsipkan dalam dokumen yang lengkap, akan tetapi, kelemahan analisis ada dua, yaitu

⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Kencana*, Jakarta, 2011, hal.455-457

memasukkan ke dalam kategori pembuat keputusan tokoh-tokoh boneka tetapi tidak mempunyai kekuasaan apa-apa karena orang lain yang memutuskan untuknya, hanya sekedar mengesahkan keputusan yang telah dibuat orang lain. Lainnya bahwa mungkin dapat dimasukkan orang-orang yang secara informasi mempunyai pengaruh pada kelompok-kelompok pembuat keputusan. Analisis posisi ini cenderung membesar-besarkan pengaruh `semua` dan meremehkan pengaruh tidak langsung.

Kedua, analisis reputasi, yaitu analisis untuk mengidentifikasi pihak berkuasa yang tidak didasarkan pada bagian organisasi resmi akan tetapi pada reputasi kekuasaan mereka secara informal. Hal ini dapat diketahui dengan menanyai informan-informan yang mengetahui mekanisme politik dari dekat. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa partisipan dalam suatu sistem mengetahui siapa yang ikut dalam pengambilan keputusan atau siapa yang berpengaruh kuat dan siapa yang tidak terpengaruh. Dengan cara ini, akan termasuk dalam kategori yang berkuasa aktor-aktor yang tidak menduduki jabatan resmi tetapi memiliki kekuasaan tidak langsung.

Analisis reputasi ini juga mempunyai kelemahan yaitu subjektivitas informan dalam memberikan informasi, artinya informan mungkin hanya menunjuk pada tokoh-tokoh yang disukainya sebagai orang-orang yang berpengaruh dan menutupi /tidak menunjuk tokoh-tokoh lain yang berpengaruh tetapi tak

disukainya. Selain itu, yang diketahui informan mungkin hanya tokoh-tokoh hanya dalam bidang-bidang tertentu saja, tidak untuk bidang lain. Oleh karena itu, analisis pertama dan kedua ini seringkali digunakan bersama-sama, yaitu analisis posisi digunakan sebagai pelengkap analisis reputasi, artinya menghubungi orang-orang yang menduduki posisi penting untuk menanyai siapa-siapa yang ikut dalam pembuatan keputusan.

Analisis yang ketiga adalah analisis keputusan yakni analisis untuk mengetahui siapa-siapa yang berkuasa dengan cara mengamati dan meneliti siapa-siapa yang ikut mengambil keputusan melalui beberapa kasus pengambilan keputusan yang dianggap cukup *representative*. Dapat diasumsikan bahwa yang mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan itu bias terdiri atas orang-orang yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan, maka kiranya analisis keputusan inilah yang paling tepat dan efektif dalam memperoleh gambaran tentang hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat, karena dengan analisis ini, maka akan dapat diikuti proses pengambilan keputusan sejak awal sampai akhir, sehingga tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya akan dengan mudah diketahui.

Sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk, namun sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Kekuasaan ada dalam

setiap bentuk masyarakat, baik yang bersahaja maupun masyarakat yang kompleks.⁶ Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, atau dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu, dengan rela atau karena terpaksa, sehingga apabila kekuasaan itu diterjemahkan pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruh-pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya.

2.2 Kepemimpinan

Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial.⁷ Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau badan. Sebagai suatu proses, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu badannya yang

menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Kepemimpinan seseorang (pemimpin) harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau social basis. Pertama-tama kepemimpinan erat hubungannya dengan susunan masyarakat. Masyarakat-masyarakat yang agraris dimana belum ada spesialisasi, biasanya kepemimpinan meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat.

Kekuatan kepemimpinan ditentukan oleh suatu lapangan kehidupan masyarakat yang suatu saat mendapat perhatian khusus dari masyarakat yang disebut *cultural focus*. *Cultural focus* dapat berpindah-pindah, misalnya pada suatu waktu dilapangan politik, lain waktu pada lapangan ekonomi, kemudian lapangan hukum dan seterusnya. Apabila dalam suatu saat *cultural focus* beralih, maka si pemimpin pun harus mampu mengalihkan titik berat kepemimpinannya pada *cultural focus* yang baru.

Setiap kepemimpinan, yang efektif harus memperhitungkan social basis apabila tidak menghendaki timbulnya ketegangan-ketegangan atau setidak-tidaknya terhindar dari pemerintahan boneka belaka. Kepemimpinan di dalam masyarakat-masyarakat hukum adat yang tradisional dan homogeni, perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat tersebut yang masih tegas-tegas memperlihatkan cirri-ciri paguyuban. Hubungan pribadi antara pemimpin dengan yang dipimpin sangat dihargai. Hal ini disebabkan,

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.230

⁷ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, cet.I, Dian Rakyat, 1967, hal.181

pemimpin-pemimpin pada masyarakat tersebut adalah pemimpin-pemimpin tidak resmi *informal leader* yang mendapat dukungan tradisi atau karena sifat-sifat pribadinya yang menonjol. Dengan sendirinya, masyarakat lebih menaruh kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin tersebut, beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkannya.

Tugas pokok seorang pemimpin :

1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya.
2. Mengawasi, mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinya
3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada duniadiluar kelompok yang dipimpin.

Seorang pemimpin ialah seseorang yang mempengaruhi orang lain. Ada 2 ciri pemimpin yang dapat diklasifikasikan yaitu :

1. Pemimpin instrumental (*instrumental leader*) (atau pemimpin yang berorientasi pada tugas, *task oriented leader*), berupaya agar kelompok tetap bergerak ke arah tujuannya. Pemimpin ini mencoba mencegah anggota agar tidak teralihkan, mengingatkan mereka akan apa yang mereka coba capai.
2. Pemimpin ekspresif (*expressive leader*) atau pemimpin sosioemosional, *socioemocional leader*), biasanya tidak diakui sebagai pemimpin tetapi nyatanya ia seorang pemimpin. Orang ini

cenderung bergurau, untuk menawarkan simpati atau melakukan hal lain yang mengangkat semangat kelompok.

Kedua tipe ini penting ; yang pertama menjamin kelompok tetap pada jalurnya, sedangkan yang kedua meningkatkan kerukunan dan membatasi konflik.

Gaya kepemimpinan (*leadership style*) yang dapat dianut :⁸

1. Pemimpin otoriter (*authoritharian leader*), yaitu seseorang yang dapat memberikan perintah.

Ciri-ciri pokoknya :

- a. Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak
- b. Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan kelompok tersebut.
- c. Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi didalam kelompok tersebut.

2. Pemimpin demokratis (*democratic leader*) yaitu seseorang yang berupaya mencapai consensus

Ciri-ciri umumnya adalah :

- a. Secara musyawarah dan mufakat pemimpin mengajak warga atau anggota kelompok untuk ikut serta merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai kelompok,

⁸ James M. Henslin, *Essensial of Sociology To Down Earth Approach* (book alone), Pearson Education Inc, 2006, yang dialih bahasakan oleh Kamanto Sunarto, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.138

- serta cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
- b. Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk-petunjuk.
 - c. Ada kritik positif, baik dari pemimpin maupun pengikut-pengikut.
 - d. Pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi didalam kegiatan-kegiatan kelompok.
3. Pemimpin *laissez-faire* (*laissez-faire leader*), yaitu seseorang yang sangat permisif.
- Ciri-ciri pokoknya adalah :
- a. Pemimpin menjalankan peranannya secara pasif
 - b. Penentuan tujuan yang akan dicapai oleh kelompok sepenuhnya diserahkan kepada kelompok
 - c. Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok
 - d. Pemimpin berada ditengah-tengah kelompok, namun hanya berperan sebagai penonton.
- a. Indra-brata, yang member kesenangan dalam jasmani
 - b. Yama-brata, yang menunjuk pada keahlian dan kepastian hukum
 - c. Surya-brata, yang menggerakkan bawahan dan mengajak mereka untuk bekerja persuasion
 - d. Caci-brata, yang member kesenangan rohaniah
 - e. Bayu-brata, yang menunjukkan keteguhan pendidikan dan rasa tidak segan-segan untuk turut merasakan kesukaran-kesukaran pengikut-pengikutnya.
 - f. Dhana-brata, menunjukkan pada suatu sikap yang patut dihormati
 - g. Paca-brata, yang menunjukkan kelebihan didalam ilmu pengetahuan, kepandaian dan keterampilan
 - h. Agni-brata, yaitu sifat memberikan semangat pada anak buah.

Gaya otoriter nampak lebih efektif dalam situasi darurat ; gaya demokratis bekerja paling baik untuk semua situasi dan gaya *laissez-faire* biasanya tidak efektif karena bersifat pasif.

Menurut Astra Brata,⁹ kepemimpinan yang akan berhasil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Kepemimpinan yang tersimpul dalam Asta Brata yang pada pokoknya menggambarkan sifat-sifat dan kepribadian delapan Dewa. Ajaran – ajaran tradisional seperti misalnya di Jawa, menggambarkan tugas pemimpin melalui pepatah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang menyatakan sebagai berikut :

*Di muka memberi tauladan
Ditengah-tengah membangun semangat
Dari belakang memberikan pengaruh*

Seorang pemimpin dapat menempati ketiga kedudukan tersebut, yaitu sebagai pemimpin di muka (*front leader*), pemimpin di tengah-tengah

⁹ Bacalah Sutjipto Wirjosuparto, *Astra Brata, Delapan Ajaran Rama kepada Bharata*, Badan Kontak Pencipta Kebudayaan Indonesia, 1964

(*social leader*) dan sebagai pemimpin dari belakang (*rear-leader*).

Kepemimpinan bias dibedakan menjadi dua :

1. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan
2. Sebagai proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Hukum ada ketika terdapat kemungkinan ketertiban hendak ditegakkan oleh seperangkat petugas khusus yang akan menggunakan pemaksaan fisik atau psikis dengan tujuan ditaatinya ketertiban atau menjatuhkan sanksi bagi pelanggar ketertiban. Setiap tatanan hukum berpengaruh langsung pada distribusi kekuasaan, ekonomi dan yang lainnya dalam masyarakat dimana tatanan itu berlaku. Hal ini berlaku untuk semua tatanan hukum dan tidak hanya tatanan hukum Negara. Secara umum, kekuasaan yang dipahami sebagai kesempatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan kehendak mereka dalam suatu tindakan komunal bahkan jika tindakan itu ditujukan untuk mengatasi perlawanan pihak lain yang berpartisipasi dalam tindakan itu.
2. Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu

pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki tersebut. Dengan demikian, keputusan para pemimpin sekaligus merupakan rasa keadilan masyarakat (pengikut) yang bersangkutan. Gaya kepemimpinan (*leadership style*) yang dapat dianut yaitu Pemimpin otoriter (*authoritharian leader*), yaitu seseorang yang dapat memberikan perintah, pemimpin demokratis (*democratic leader*) yaitu seseorang yang berupaya mencapai consensus, dan pemimpin *laissez-faire* (*laissez-faire leader*), yaitu seseorang yang sangat permisif.

3.2 SARAN

1. Pemimpin yang baik, haruslah tahu, saluran kekuasaan yang akan dipakainya dalam mempertahankan kekuasaannya, tentu saja harus berbasis pada keahlian pokok, seperti ekonomi, politik, militer, sosial, harta kekayaan dan sebagainya.
2. Dalam melaksanakan kekuasaannya, maka akan sangat tergantung pada struktur masyarakat (pengikut) yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori,*

- Aplikasi dan Pemecahannya, Kencana*, Jakarta, 2011.
- James M. Henslin, *Essensial of Sociology To Down Earth Approach* (book alone), Pearson Education Inc, 2006, yang dialih bahasakan oleh Kamanto Sunarto, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Jane C. Ollenburger dan Helen A. More, *A Sociology of Woman*, yang diterjemahkan oleh Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana, *Sosiologi Wanita*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (ed.Revisi), Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 2004.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, cet.I, Dian Rakyat, 1967.
- Max Weber, *Essay in Sociology*, Oxford Univercity Press, 1946, yang diterjemahkan oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea, *Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Paul H. Hurton dan Chester L. Hunt, *Sociology* (six editon), Western Michigan Univercity, Mcgraw-Hill, USA, 1984, yang dialih bahasakan oleh Aminuddin Ram dan Tita Sobaru, *Sosiologi*, Erlangga Jakarta, 2006.
- Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Selo Soemardjan, *Pola-Pola kepemimpinan Dalam Pemerintahan*, ceramah pada Coaching Management Lembaga Pertahanan Nasional, 7 Maret 1967, tidak diterbitkan.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

